

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan yang prima akan mendorong perubahan teknologi yang saat ini ada dengan teknologi yang lebih baru agar tetap relevan dan tidak tertinggal.

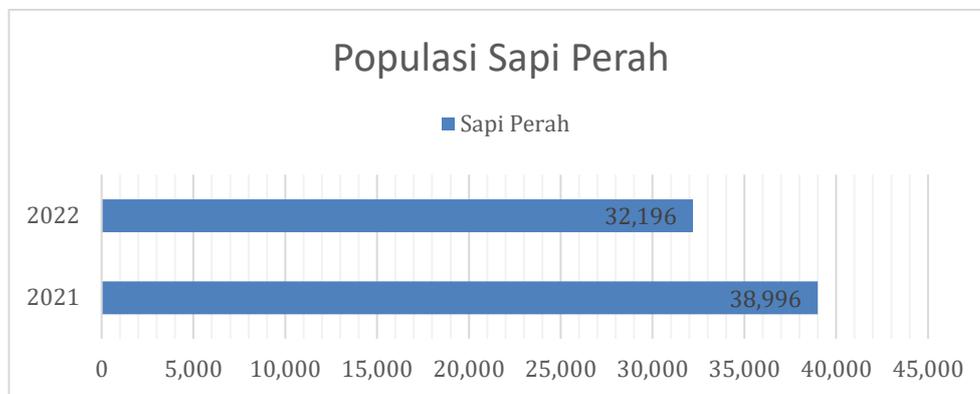
Pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan. Implementasi dan adopsi TI dapat meningkatkan pelayanan, bermanfaat dalam proses pengolahan data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung pengambilan keputusan, memudahkan alur layanan, keterbukaan atau transparansi kepada *stakeholders*, dan membuat kinerja pemerintahan yang lebih efisien (IPDN, 2018). Pengelolaan teknologi informasi merupakan perwujudan dari pemenuhan hak informasi bagi warga negara (Kemenko Polhukam, 2021). Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu bersama-sama mengelola komunikasi publik untuk menciptakan “*a well informed society*” untuk memenuhi hak warga negara tersebut (Priyatna dkk, 2020). Oleh karena itu, diperlukan tiga langkah strategis yang harus dilakukan oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Yaitu: Pertama, perlu dibangun pengaturan sistem komunikasi, kedua pengembangan infrastruktur komunikasi, ketiga komunikasi publik (Priyatna dkk, 2020).

Peranan teknologi informasi bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada kebutuhan teknologi informasi dalam kegiatan dan proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, pelayanan publik, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang serta meningkatkan produktifitas, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi dan inovasi di bidang perikanan dan peternakan.

Beberapa permasalahan TI pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat antara lain adalah belum optimalnya budidaya peternakan dalam penerapan teknologi, kondisi kelembagaan peternakan saat ini masih bersifat budaya dan belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai

teknologi informasi, terbatasnya penerapan teknologi tepat guna bagi peternak dalam menunjang produktivitas, dan beberapa proses operasional belum dibantu dengan teknologi informasi.

Pada permasalahan fungsi pengamatan penyakit PMK sapi perah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. PMK berdampak pada populasi ternak tahun 2021-2022, sehingga menyebabkan penurunan populasi ternak, merujuk pada data Badan Pusat Statistik, saat ini populasi sapi perah tahun 2021 mencapai 38,996 ekor dan tahun 2022 mencapai 32,196 ekor (Badan Pusat Statistik. 2021-2022). Hal ini sangat berdampak bagi peternak wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga menyebabkan kasus PMK tertinggi se-Jawa Barat (Makmun, 2023).



Tabel I- 1 Populasi Sapi Perah PMK

Pada permasalahan tata kelola pemerintahan merujuk pada Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Perangkat Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, kinerja dan akuntabilitasnya dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Salah satu sasaran strategis Dinas Perikanan dan Peternakan adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi dengan indikator kerjanya adalah nilai SAKIP (Laporan Kinerja, 2022). SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan (MC Sijunjung, 2021). Nilai SAKIP Dinas

Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2021 mendapat nilai B atau 69,16 (92,2% dari target nilai BB). Persentase realisasi Nilai SAKIP Tahun Anggaran 2021 meningkat 3,6% dibandingkan dengan nilai SAKIP Tahun Anggaran 2020, dan terhadap target akhir RPJMD tahun 2023 adalah sebesar 86.4% (Laporan Kinerja, 2022).

Dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan peran teknologi informasi di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat saat ini, pengembangan *enterprise architecture* sangat penting untuk menyelaraskan strategi bisnis dan teknologi informasi. Hal ini diperlukan untuk menerapkan sistem informasi yang meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung berlangsungnya aktivitas bisnis.

Enterprise Architecture (EA) membantu organisasi mengelola sistem yang kompleks dan membantu menyelaraskan teknologi informasi dan bisnis (Ansyori dkk, 2018). EA dapat membantu organisasi dalam pengambilan keputusan dengan membuat *blueprint* situasi saat ini dan strategi bisnis ke depannya (Ansyori dkk, 2018). EA mendorong organisasi untuk melakukan standarisasi, konsistensi, kepatuhan, dan integrasi dalam menyelaraskan sistem informasi, teknologi informasi, kebijakan, proses, dan kerangka untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis (Soewito, 2018). Namun, kebanyakan organisasi masih menghadapi masalah dalam mengimplementasikan EA (Soewito, 2018). Organisasi tidak dapat menerjemahkan solusi EA untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun ada banyak pilihan kerangka kerja EA (Ansyori dkk, 2018).

Dengan mempertimbangkan masalah di atas, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat adalah untuk “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi”. Dalam penelitian tugas akhir ini, diperlukan sumber daya infrastruktur yang kuat untuk menjalankan amanah Perbup No 62 Tahun 2021 Perangkat daerah dan juga menghadapi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, untuk menjadi lebih fleksibel dan memaksimalkan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai visi dan misi

mereka. Dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan keselarasan antara teknologi informasi dengan proses bisnis. Untuk melakukan ini, disarankan untuk menerapkan EA dengan menggunakan *framework* TOGAF. *Framework* TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*) memberikan konteks strategis untuk memenuhi semua kebutuhan untuk evolusi sistem teknologi informasi. Diharapkan dengan perancangan EA ini, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat akan memiliki peta proses bisnis yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, dan memberikan pelayanan yang berkualitas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka *output* dari perumusan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana implementasi *Enterprise Architecture* dalam bentuk *blueprint* yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis dan mencapai target kinerja pelayanan sesuai dengan program pada bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat. Bidang tersebut memiliki sasaran strategis “Terlaksananya pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan kesiagaan darurat wabah PMK” (*Profile PusKesWan*, 2021). Dari perancangan EA tersebut, diharapkan adanya peningkatan kinerja layanan kepada masyarakat dan peternak melalui integrasi arsitektur bisnis, domain data dan domain aplikasi, arsitektur teknologi, dan peluang serta solusi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan peternak sesuai standar TOGAF ADM.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu: menghasilkan rancangan *blueprint enterprise architecture* untuk mewujudkan solusi integrasi arsitektur bisnis, domain data dan domain aplikasi, arsitektur teknologi, dan peluang serta solusi pada bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat. Dari pemecahan masalah tersebut, diharapkan bidang tersebut mencapai tujuan untuk mewujudkan suatu layanan kesehatan hewan yang efektif dan efisien sesuai Perbup No. 62 Tahun 2021 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.4 Lingkup Penelitian

Batasan dalam penelitian ini dibatasi pada bidang Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan *Enterprise Architecture* kerangka kerja TOGAF ADM. Dengan *Enterprise Architecture* dapat menyusun elemen-elemen *enterprise* yang digunakan dalam merencanakan, mendesain dan merealisasikan suatu struktur *enterprise*, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. *Enterprise Architecture* mempunyai arti penting bagi sebuah organisasi sebab salah satu hasilnya adalah terwujudnya keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Beberapa keuntungan dari implementasi *enterprise architecture* yang baik adalah: operasi teknologi informasi lebih efisien, investasi teknologi informasi yang bermanfaat pada pencapaian target organisasi, mengurangi risiko dalam hal penyimpangan terhadap aturan, lebih cepat, sederhana, dan operasi bisnis lebih efisien. Dalam merencanakan dan merancang sebuah arsitektur *enterprise* diperlukan *framework* (kerangka kerja), *framework* adalah sebuah cetak biru (*blueprint*) yang menjelaskan bagaimana elemen teknologi informasi dan manajemen informasi bekerjasama sebagai satu kesatuan. *Blueprint* berguna sebagai panduan atau pedoman yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam merancang, merencanakan, mengukur, dan memantau pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis *enterprise*. Salah satu model dalam merencanakan dan merancang arsitektur *enterprise* sistem informasi adalah TOGAF ADM. Beberapa siklus TOGAF ADM yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Preliminary, Phase A: Architecture Vision, Phase B: Business Architecture, Phase C: Information System Architecture (Data Architecture dan Application Architecture), Phase D: Technology Architecture, dan Phase E Opportunities and Solutions.*

1.5 Manfaat penelitian

Hasil penelitian tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi proses bisnisnya, sehingga para peternak lebih berkembang di era Teknologi 4.0, serta meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan hewan.
2. Bagi peneliti lain yang bergerak dalam sistem informasi kesehatan hewan, penelitian ini bermanfaat dalam menjelaskan pendekatan TOGAF ADM dalam membangun upaya digitalisasi aktivitas pelayanan kesehatan hewan.
3. Bagi peneliti lain yang bergerak dalam bidang kesehatan hewan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi yang berkaitan dengan perancangan TOGAF ADM di dalam lingkungan pemerintahan.
4. Bagi penulis menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait penerapan teknologi informasi guna mendukung layanan publik pada organisasi pemerintahan daerah.